



PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI

(Pendekatan Konvensional dan Islam)



Rokhimah, M.M.

Syafri Yanto, M.M.

Andre Kussuma Adiputra, S.E., M.Si.

Fauzah Nur Aksa, S.Ag., M.H.

PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI

(Pendekatan Konvensional dan Islam)

PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI (Pendekatan Konvensional dan Islam)

Rokhimah, M.M.

Syafri Yanto, M.M.

Andre Kussuma Adiputra, S.E., M.Si.

Fauzah Nur Aksa, S.Ag., M.H.



PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI (Pendekatan Konvensional dan Islam)

Penulis:

Rokhimah, M.M.

Syafri Yanto, M.M.

Andre Kussuma Adiputra, S.E., M.Si.

Fauzah Nur Aksa, S.Ag., M.H.

Editor:

Prof. Dr. La Ino, S.Pd., M.Hum.

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Juni 2025

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Rafflesia VI D.151

Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025

; 14,8 x 21 cm

ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku ini yang berjudul "*Perbandingan Sistem Ekonomi (Pendekatan Konvensional dan Islam)*." Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dalam menjelaskan secara komprehensif berbagai sistem ekonomi yang berkembang di dunia, serta menawarkan sudut pandang Islam sebagai alternatif yang adil dan berimbang.

Latar belakang penulisan buku ini berangkat dari kegelisahan terhadap dominasi sistem ekonomi konvensional yang kerap melahirkan ketimpangan dan krisis, serta perlunya pemahaman lebih mendalam terhadap sistem ekonomi Islam yang selama ini masih dipahami secara parsial. Melalui perbandingan yang sistematis, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat umum yang ingin memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem, serta menjadikan ekonomi Islam sebagai landasan solusi yang lebih berkeadilan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan dalam proses penyusunan buku ini. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan refleksi dalam membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan bermoral.

(Penulis)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I DEFINISI DAN KOMPONEN SISTEM EKONOMI	1
A. Pengertian Sistem Ekonomi dan Ilmu Ekonomi	1
B. Ruang Lingkup Studi Sistem Ekonomi	4
C. Masalah Pokok dalam sistem ekonomi	6
D. Kelompok Pemikir Ekonomi	9
E. Perlunya Sistem Ekonomi di Indonesia	12
BAB II KONSEP DASAR SISTEM EKONOMI	16
A. Teori Sistem Ekonomi	16
B. Pengertian dan Ciri-Ciri Sistem Ekonomi	20
C. Elemen-Elemen Dalam Perbandingan Sistem Ekonomi	22
D. Ideologi Dan Sejarah Tentang Sistem Ekonomi	25
E. Fungsi Sistem Ekonomi Dalam Perekonomian	28
BAB III SISTEM EKONOMI KAPITALIS	33
A. Pengertian Sistem Ekonomi Kapitalis	33
B. Latar Belakang Lahirnya Ekonomi Kapitalis	35
C. Pertumbuhan Dan Perkembangan Sisteim Ekonomi Kapitalis	40
D. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Kapitalis	42
E. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Kapitalis	43
F. Individualisme: Asas Fundamental Kapitalisme	46
G. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Kapitalis	49

BAB IV SISTEM EKONOMI SOSIALIS	52
A. Pengertian Sistem Ekonomi Sosialis	52
B. Sejarah Timbulnya Gerakan Sosialis	53
C. Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Sosialis	56
D. Sosialisme Menolak Hak Individu	59
E. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Sosialis	60
F. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Sosialis	62
 BAB V SISTEM EKONOMI CAMPURAN	 67
A. Pengertian Sistem Ekonomi Campuran	67
B. Elemen-Elemen Sistem Ekonomi Campuran	69
C. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Campuran	72
D. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Campuran	75
 BAB VI SISTEM EKONOMI ISLAM	 78
A. Pengertian Sistem Ekonomi Islam	78
B. Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Islam	79
C. Lembaga-Lembaga Sistem Ekonomi Islam	82
D. Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Islam	86
 DAFTAR PUSTAKA	 91
 RIWAYAT HIDUP PENULIS I	 94

BAB I

DEFINISI DAN KOMPONEN SISTEM EKONOMI

A. Pengertian Sistem Ekonomi dan Ilmu Ekonomi

Pengertian dari sistem ekonomi sangat luas dan tidak dapat dipisahkan dari terminologi sistem ekonomi itu sendiri. secara umum, sistem ekonomi adalah kesatuan yang sifatnya menyeluruh, di dalamnya terdapat bagian-bagian yang memiliki ciri-ciri sendiri, dan antar bagian-bagian yang memiliki keterkaitan yang saling mendukung sehingga membentuk mekanisme kerja yang menyatu (Darwin, dkk, 2021:18).

Arti kata “sistem” sendiri berdasarkan Webster’s New Collegiate Dictionary adalah kesatuan item (sub-item yang berinteraksi atau bergantung satu sama lain dalam membentuk suatu kesatuan yang utuh. Darwin (2021) juga mengutip pendapat Dumairy yang mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Selanjutnya, Dumairy juga menjelaskan sistem ekonomi lebih rinci lagi sebagai berikut: sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur-unsur manusia sebagai subjek; barang-barang ekonomi sebagai objek; serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnnya dalam kegiatan berekonomi .

Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi Lembaga Lembaga ekonomi (formal maupun nonformal); cara kerja; mekanisme hubungan; hukum dan peraturan-peraturan perekonomian; serta kaidah dan norma-norma lain (tertulis

maupun tidak tertulis); yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat, perangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat; sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan. Pada pengertian lainnya, sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya.

Darwin juga menambahkan hasil penelitian dari Sheridan. Berdasarkan penelitiannya mengenai sistem-sistem ekonomi yang ada di Asia, mengatakan bahwa *"Economic system refers to the way people perform economic activities in their search for personal happiness"*. Dalam kata lain, sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. Sedangkan, diuraikan juga bahwa sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi, sosial, politik, ide-ide) yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya yang ditujukan ke arah pemecahan problem-problem, produksi-distribusi konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian selain itu Darwin juga mengutip pengertian dari sistem ekonomi dari Lemhannas sebagai berikut: sistem ekonomi merupakan cabang dari ilmu ekonomi. Adapun sistem diartikan sebagai suatu totalitas terpadu yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan, saling terkait, saling mempengaruhi dan saling tergantung menuju tujuan bersama. sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada kelompok masyarakat tersebut

Dengan demikian, sistem ekonomi dapat diartikan sebagai susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur. Dalam sistem ekonomi itu dibahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalan ekonomi masyarakat tersebut dalam mewujudkan tujuan nasional.

Sedangkan Ilmu Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang banyak dengan sarana pemenuhan yang terbatas. Ilmu ekonomi juga dapat dipahami sebagai usaha dalam membuat suatu alternatif barang atau jasa untuk memuaskan kebutuhan hidup manusia yang tak terbatas.

Terdapat beberapa pembagian dalam Ilmu Ekonomi. Menurut "*Alfred W. Stonier dan Douglas C. Hague*" membagi ilmu ekonomi menjadi 3 kelompok yaitu: Ilmu Ekonomi Deskriptif, Ilmu Ekonomi Teori, dan Ilmu Ekonomi Terapan.

- a.) Ilmu Ekonomi Deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan kondisi sebenarnya berdasarkan fakta dalam perekonomian.
- b.) Ilmu Ekonomi Teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab-akibat, dan cara kerja sistem ekonomi. Ilmu Ekonomi Teori terbagi lagi menjadi Ilmu Ekonomi Mikro dan Ilmu Ekonomi makro.
- c.) Ilmu Ekonomi Terapan yaitu analisis ekonomi teori untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan pedoman yang tepat untuk menangani masalah ekonomi tertentu.

Dengan mempelajari ilmu ekonomi, kita bisa memprediksi tindakan manusia ke depannya yang kemudian bisa digunakan untuk perencanaan bisnis, penentuan harga, membuat kebijakan pemasaran, kebijakan sumber daya

manusia, hingga membuat kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Ruang Lingkup Studi Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi merupakan seperangkat aturan, mekanisme, dan lembaga yang mengatur dan mengorganisir kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Studi sistem ekonomi tidak hanya terbatas pada bagaimana masyarakat mengelola sumber daya, memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa, tetapi juga mencakup pemahaman yang lebih luas terhadap ideologi, struktur kekuasaan, sistem hukum, serta relasi antara negara dan pasar. Dengan kata lain, sistem ekonomi senantiasa terkait erat dengan aspek politik, sosial, dan budaya yang berlaku di suatu wilayah.

Salah satu aspek penting dalam studi sistem ekonomi adalah hubungan antara sistem ekonomi dan sistem politik. Setiap negara memiliki karakteristik politik yang mempengaruhi orientasi dan implementasi kebijakan ekonominya. Misalnya, negara-negara dengan sistem demokrasi liberal cenderung menerapkan sistem ekonomi pasar bebas (kapitalis), sementara negara-negara otoriter atau yang menganut ideologi sosialis akan menampilkan ciri ekonomi yang lebih terpusat dan dikendalikan negara. Dalam konteks ini, sistem ekonomi tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkelindan dengan struktur kekuasaan dan pilihan ideologis suatu bangsa.

Perubahan sistem politik dalam suatu negara juga seringkali diikuti oleh perubahan dalam sistem ekonominya. Contoh nyata dapat dilihat dalam sejarah Indonesia. Pergantian sistem politik dari Demokrasi Terpimpin menuju Demokrasi Pancasila tidak hanya mengubah struktur

pemerintahan, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kebijakan ekonomi nasional. Pada masa Demokrasi Terpimpin, ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet menyebabkan kebijakan ekonomi menjadi tidak konsisten dan pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil. Akibatnya, menjelang akhir era Demokrasi Terpimpin, perekonomian Indonesia mengalami penurunan yang cukup tajam, antara lain ditandai oleh inflasi tinggi, defisit anggaran, dan menurunnya kepercayaan investor.

Dalam kajian akademik, ruang lingkup studi sistem ekonomi meliputi beberapa pokok bahasan penting. Pertama, pengertian sistem ekonomi itu sendiri, yaitu sebagai seperangkat aturan atau mekanisme yang mengatur aktivitas ekonomi di suatu negara. Kedua, jenis-jenis sistem ekonomi, antara lain sistem ekonomi kapitalis, sosialis, campuran, dan sistem ekonomi Islam. Masing-masing sistem memiliki landasan filosofis, tujuan, serta pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan persoalan ekonomi.

Ketiga, studi sistem ekonomi juga mencakup konsep dasar sistem ekonomi, seperti siapa yang menentukan apa yang diproduksi, bagaimana cara produksi dilakukan, dan untuk siapa barang dan jasa didistribusikan. Dalam sistem kapitalis, misalnya, pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh mekanisme pasar. Sementara dalam sistem sosialis, negara memainkan peran dominan dalam mengatur produksi dan distribusi. Sistem campuran mencoba menyeimbangkan keduanya, sedangkan sistem ekonomi Islam memberikan penekanan khusus pada nilai keadilan, distribusi kekayaan, dan larangan eksploitasi.

Keempat, penting juga untuk mempelajari komponen sistem ekonomi, seperti lembaga-lembaga ekonomi, peran negara, pelaku ekonomi, dan mekanisme insentif serta

distribusi. Komponen-komponen ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial, budaya, dan ideologi masyarakat tempat sistem tersebut berlaku. Oleh karena itu, studi sistem ekonomi tidak bisa hanya dilihat dari aspek teknis ekonomi saja, melainkan harus dilihat secara komprehensif sebagai suatu sistem sosial yang dinamis.

Terakhir, ruang lingkup studi sistem ekonomi mencakup pula analisis terhadap keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem, serta bagaimana sistem-sistem tersebut merespon perubahan zaman dan tantangan global, seperti krisis ekonomi, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan. Dalam hal ini, pendekatan perbandingan menjadi sangat penting agar pembaca atau mahasiswa dapat memahami bahwa tidak ada satu pun sistem ekonomi yang benar-benar sempurna, namun masing-masing memiliki prinsip, nilai, dan mekanisme yang sesuai dengan konteks penerapannya.

Dengan memahami ruang lingkup studi sistem ekonomi secara utuh, pembaca diharapkan mampu menganalisis fenomena ekonomi secara kritis, memahami relevansi teori dengan praktik, serta menilai efektivitas suatu sistem ekonomi dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

C. Masalah Pokok dalam sistem ekonomi

Dalam analisis ekonomi, kebutuhan untuk membuat pilihan akan timbul secara tiba-tiba akibat dari adanya ketidak seimbangan antara keinginan masyarakat dengan kemampuan faktor-faktor produksi untuk memenuhi keinginan tersebut, diterangkan lebih lanjut dengan mengemukakan tips persoalan berikut: 1. Apakah jenis barang dan jasa yang harus diproduksi? 2. Bagaimanakah

barang dan jasa tersebut diproduksi? 3. Untuk siapakah barang dan jasa tersebut diproduksi?

Dalam analisis ekonomi ketiga-tiga persoalan diatas diterangkan lebih lanjut dengan menggunakan kurva kemungkinan produksi. Dengan menggunakan kurva tersebut dapat diterangkan hal-hal berikut: 1. sampai dimana kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa, 2. bagaimana masyarakat akan membuat pilihan terhadap barang yang harus diproduksi, 3. bagaimana perkembangan faktor-faktor produksi dan perkembangan teknologi akan mempengaruhi perkembangan kemampuan masyarakat untuk memproduksi, dan 4. apakah efek dari ketidakmampuan masyarakat menggunakan faktor-faktor produksi secara efisien.

Kemungkinan produksi dapat ditunjukkan bahwa setiap masyarakat tidak dapat memperoleh semua barang yang mereka inginkan. Oleh sebab itu mereka harus membuat pilihan. Dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia sektor produksi dapat menghasilkan berbagai kombinasi barang yang dapat diproduksi. Pilihan masyarakat yang dinyatakan dalam interaksi masyarakat dan para penjual di pasar barang akan menentukan jenis dan jumlah barang.

Pertambahan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi akan mengembangkan perekonomian dan menambah kemampuan perekonomian tersebut menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Dengan demikian melalui pertambahan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi kemakmuran masyarakat akan dapat ditingkatkan.

Setiap masyarakat menyelesaikan ketiga-tiga masalah pokok dalam perekonomian dengan cara yang berbeda. Hal

itu bergantung kepada sistem ekonomi yang digunakan perekonomian tersebut. Dalam analisis ekonomi sistem ekonomi dibedakan kepada tiga bentuk: perekonomian pasar bebas, perekonomian perencanaan pusat dan perekonomian campuran. Setiap sistem ekonomi ini menyelesaikan tiga masalah pokok dalam perekonomian yaitu “Apa”, “Bagaimana” dan “Untuk Siapa” dengan cara yang berbeda.

Dalam sistem perekonomian pasar bebas, faktor-faktor produksi dimiliki oleh pihak swasta dan mereka mempunyai kebebasan untuk menggunakannya. Sektor perusahaan akan berusaha untuk menggunakan secara paling efisien dan memberi keuntungan yang paling maksimum. Sistem perekonomian pasar bebas mencapai tujuan tersebut melalui interaksi diantara pengusaha dan pembeli (perusahaan dan rumah tangga) di dalam pasaran. Mekanisme pasar akan memberi petunjuk dalam usaha masyarakat untuk menyelesaikan masalah “Apa”, “Bagaimana” dan “Untuk Siapa”.

Dalam sistem perencanaan pusat, semua faktor-faktor produksi dan unit-unit produksi dimiliki oleh pemerintah. Melalui pemilikannya ini pemerintah melalui perencanaan pusat akan menentukan penggunaan faktor-faktor produksi yang tersedia dan alokasinya ke berbagai unit produksi. Sebagai implikasi dari pengaturan ekonomi seperti ini, persoalan “Apa”, “Bagaimana” dan “Untuk Siapa” diselesaikan oleh perencana pusat. Konsumen (rumah tangga) tidak mempunyai hak dalam menentukan barang-barang yang diinginkannya dan perlu diproduksi (Binadarma:19).

Kebanyakan negara dalam praktiknya menggunakan sistem perekonomian campuran yaitu pengaturan kegiatan ekonomi sebagian besar ditentukan oleh pasar

bebas(mekanisme pasar), dan sebagian lainnya diatur dan dilakukan oleh Pemerintah.

D. Kelompok Pemikir Ekonomi

Pemikiran tentang sistem ekonomi yang ideal bagi suatu bangsa merupakan proses yang bersifat dinamis dan tidak pernah berhenti. Setiap negara memiliki pengalaman sejarah, kondisi sosial-politik, serta landasan filosofis yang berbeda dalam menentukan sistem ekonominya. Indonesia, sebagai negara yang berdiri di atas landasan Pancasila dan UUD 1945, juga mengalami perdebatan panjang mengenai sistem ekonomi yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks ini, pergulatan pemikiran mengenai sistem ekonomi yang ideal telah berlangsung sejak sebelum Indonesia merdeka hingga kini. Menurut Sri-Edi Swasono (1985), dinamika pemikiran ini sesungguhnya merupakan penafsiran terus-menerus terhadap Pasal 33 UUD 1945, yang menjadi dasar konstitusional bagi sistem ekonomi Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan" (ayat 1), serta menekankan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak (ayat 2 dan 3). Inilah dasar dari sistem ekonomi Pancasila, yang pada hakikatnya menolak ekstrimnya kapitalisme liberal maupun sosialisme totaliter.

Berikut adalah pemikiran beberapa tokoh penting dalam sejarah ekonomi Indonesia:

1. Mohammad Hatta

Mohammad Hatta, proklamator kemerdekaan sekaligus Wakil Presiden pertama RI, adalah sosok utama di

balik perumusan Pasal 33 UUD 1945. Pemikiran ekonominya dilandasi oleh pengalaman penjajahan selama berabad-abad yang memperlihatkan dampak buruk dari sistem ekonomi kolonial yang liberal dan eksploitatif.

Hatta menekankan bahwa sistem ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah sistem ekonomi kekeluargaan, dengan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Baginya, koperasi adalah jembatan yang mampu menghubungkan kepentingan ekonomi rakyat kecil dengan ekonomi nasional dan internasional. Koperasi mengandung nilai-nilai demokratis, kebersamaan, dan keadilan sosial yang sejalan dengan Pancasila. *“Koperasi bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga alat perjuangan dan pembebasan ekonomi rakyat.”* (Mohammad Hatta, dalam “Membangun Koperasi dan Ekonomi Rakyat” 1954).

2. Wilopo

Wilopo, salah satu tokoh politik dan ekonom di awal kemerdekaan, memiliki interpretasi yang tegas terhadap sistem ekonomi Pancasila. Dalam pandangannya, Pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit menolak sistem ekonomi liberal, karena sistem tersebut mengandalkan sektor swasta yang menjadi motor penggerak utama ekonomi. Wilopo menilai bahwa dominasi swasta akan mengarah pada eksploitasi kaum lemah dan memperlebar kesenjangan sosial.

Wilopo mengkhawatirkan bahwa ketergantungan pada modal dan kekuatan pasar akan menjauhkan Indonesia dari prinsip keadilan sosial. Oleh karena itu, ia cenderung mendorong peran negara yang dominan dalam mengelola sektor-sektor strategis.

3. Widjojo Nitisastro

Sebagai arsitek pembangunan nasional era Orde Baru, Widjojo Nitisastro memiliki pandangan yang berbeda. Ia berpendapat bahwa Pasal 33 UUD 1945 tidak seharusnya dimaknai sebagai penolakan terhadap sektor swasta. Dalam perspektifnya, sektor swasta justru memiliki peran strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, asalkan diarahkan dan diawasi oleh negara.

Widjojo mengusulkan model ekonomi campuran, di mana negara tetap memegang kendali atas sektor-sektor vital, namun memberi ruang yang cukup bagi dunia usaha. Dengan demikian, keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial bisa dicapai. *“Pertumbuhan dan pemerataan dapat berjalan bersamaan jika kebijakan publik mampu mengarahkan peran sektor swasta secara produktif.”* (Widjojo Nitisastro, dalam “Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah” 2005).

4. Emil Salim

Emil Salim, seorang ekonom dan mantan Menteri Lingkungan Hidup, menawarkan pendekatan ekonomi pasar yang terencana. Dalam pandangannya, Indonesia perlu mengintegrasikan dua pendekatan ekstrem: sistem pasar bebas dan sistem komando negara. Sistem ekonomi pasar dengan perencanaan memungkinkan negara tetap memainkan peran dalam mengatur arah pembangunan, tanpa mematikan inisiatif swasta.

Emil juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan keadilan dalam pertumbuhan ekonomi, serta perlunya memperhatikan dimensi lingkungan hidup dan sosial dalam setiap kebijakan pembangunan ekonomi.

Keempat tokoh tersebut menunjukkan bahwa pemikiran tentang sistem ekonomi di Indonesia berkembang dalam spektrum yang luas—dari pendekatan yang sangat berorientasi pada peran negara, hingga pendekatan yang memberi tempat bagi mekanisme pasar. Namun demikian, semua pemikiran tersebut tetap berpijak pada semangat UUD 1945 dan Pancasila, terutama prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Melalui studi terhadap pemikiran para tokoh ini, kita dapat memahami bahwa sistem ekonomi Indonesia bukanlah sistem yang bersifat kaku, tetapi terbuka terhadap dinamika zaman, dengan tetap menjaga nilai-nilai dasar kebangsaan.

E. Perlunya Sistem Ekonomi di Indonesia

Setiap negara pasti memiliki struktur dan dinamika perekonomian yang berbeda, bergantung pada sejarah, budaya, sumber daya alam, serta kondisi sosial dan politiknya. Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia tidak terlepas dari kompleksitas tersebut. Dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berubah, keberadaan sistem ekonomi bukan hanya penting, melainkan mutlak diperlukan. Sistem ekonomi merupakan suatu kerangka yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi—produksi, distribusi, konsumsi, dan investasi—agar dapat berjalan dengan tertib, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

1. Sistem Ekonomi sebagai Fondasi Pengelolaan Ekonomi Nasional

Keberadaan sistem ekonomi memberikan arah yang jelas bagi negara dalam menjalankan roda perekonomian. Ia berfungsi sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan yang

menyangkut pengelolaan sumber daya, distribusi barang dan jasa, hingga penentuan peran sektor publik dan swasta. Tanpa sistem ekonomi yang jelas, arah kebijakan akan mudah berubah tergantung kepentingan politik jangka pendek, dan ini bisa berakibat fatal pada stabilitas ekonomi nasional (Sukirno, 2016).

Dalam konteks Indonesia, sistem ekonomi diperlukan untuk menyesuaikan antara prinsip-prinsip dasar negara, yaitu Pancasila dan UUD 1945, dengan realitas ekonomi global. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menyadari bahwa sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia harus berbeda dari sistem kapitalistik Barat maupun sosialistik Timur. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, bukan atas kompetisi bebas atau dominasi negara secara mutlak.

2. Mencegah Kesenjangan dan Ketimpangan Sosial

Ketimpangan sosial-ekonomi menjadi ancaman serius bagi stabilitas nasional. Dalam sistem ekonomi liberal, misalnya, pasar menjadi aktor utama dalam menentukan alokasi sumber daya. Hal ini seringkali melahirkan ketimpangan, karena hanya pihak yang memiliki modal besar yang mampu bertahan dan berkembang. Sebaliknya, kelompok kecil dan lemah dalam masyarakat semakin terpinggirkan.

Sistem ekonomi Indonesia harus mampu menjadi alat untuk mengurangi jurang antara kaya dan miskin, antara daerah maju dan tertinggal. Oleh sebab itu, sistem ekonomi diperlukan agar distribusi pendapatan dan kekayaan dapat dilakukan secara lebih adil. Sistem ini harus mendorong intervensi negara dalam bentuk kebijakan fiskal, subsidi,

pembangunan infrastruktur merata, dan dukungan bagi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional (Todaro & Smith, 2012).

3. Menghadapi Dinamika dan Ketidakpastian Global

Dunia kini tengah berada dalam ketidakpastian ekonomi global yang tinggi akibat geopolitik, krisis energi, perubahan iklim, hingga fluktuasi nilai tukar. Dalam situasi seperti ini, Indonesia membutuhkan sistem ekonomi yang adaptif dan resilien. Sistem ini harus mampu menjadi penopang yang kuat bagi daya tahan ekonomi nasional. Artinya, tidak cukup hanya bertumpu pada kekuatan pasar atau kebijakan negara semata, melainkan harus dibangun dalam sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Di sinilah urgensi sistem ekonomi yang berbasis nilai, seperti sistem ekonomi Pancasila, menjadi sangat relevan. Sistem ini menggabungkan efisiensi pasar dengan keadilan sosial, serta menekankan pentingnya partisipasi kolektif dalam pembangunan economic.

4. Menjamin Kepastian Hukum dan Kebijakan

Sistem ekonomi memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. Ketika kebijakan ekonomi didasarkan pada kerangka sistem yang jelas, maka pelaku ekonomi tidak akan dirundung ketidakpastian dalam berinvestasi, membuka usaha, atau menjalankan aktivitas produksi. Hal ini sangat penting dalam menarik investasi baik domestik maupun asing.

Dengan kepastian hukum dan kebijakan ekonomi yang konsisten, Indonesia akan lebih kompetitif dalam arena global. Sistem ekonomi juga membantu dalam menyusun

regulasi yang berpihak pada kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat luas.

5. Menopang Tujuan Nasional

Sistem ekonomi di Indonesia sejatinya bukan hanya alat teknis, melainkan juga instrumen ideologis. Ia menjadi cara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Tujuan akhir dari keberadaan sistem ekonomi adalah menciptakan masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera.

Tanpa sistem ekonomi yang terarah dan berpijak pada ideologi nasional, pembangunan ekonomi dapat kehilangan ruhnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun timpang, misalnya, justru akan menimbulkan gejolak sosial. Oleh karena itu, sistem ekonomi menjadi perekat antara tujuan nasional dan strategi pembangunan.

Perlunya sistem ekonomi di Indonesia bukan semata-mata untuk mengatur teknis kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai landasan filosofis, sosial, dan politik yang membimbing bangsa dalam meraih keadilan dan kemakmuran. Sistem ekonomi yang ideal bagi Indonesia adalah yang mampu menyeimbangkan antara efisiensi dan keadilan, pertumbuhan dan pemerataan, pasar dan negara, serta nasionalisme dan keterbukaan. Sistem ini harus senantiasa dikaji, diperbarui, dan disesuaikan dengan dinamika zaman agar tetap relevan bagi generasi masa kini dan masa depan.

BAB II

KONSEP DASAR SISTEM EKONOMI

A. Teori Sistem Ekonomi

Teori sistem ekonomi merupakan kerangka konseptual yang dirancang untuk memahami, menjelaskan, dan menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi dalam suatu masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut meliputi bagaimana cara terbaik untuk mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan keterampilan agar dapat menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam konteks inilah teori sistem ekonomi memainkan peran penting sebagai alat analisis sekaligus sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perumusan kebijakan ekonomi suatu negara.

Menurut Subandi (2018), teori sistem ekonomi berusaha menjawab permasalahan ekonomi dengan cara mengorganisasi faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tercapai efisiensi, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia bukan hanya berfokus pada aspek teknis ekonomi, melainkan juga mencakup dimensi sosial, politik, dan budaya yang membentuk cara suatu bangsa menyusun tatanan ekonominya.

1. Konsep Sistem Ekonomi Menurut Para Ahli

Salah satu definisi komprehensif mengenai sistem ekonomi dikemukakan oleh L. James Haverly. Ia menyatakan bahwa sistem ekonomi adalah prosedur logis serta rasional yang dirancang untuk merangkai komponen-komponen ekonomi yang saling berhubungan, dan bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu, seperti

kesejahteraan masyarakat (Havery dalam Subandi, 2018). Dengan kata lain, sistem ekonomi mencerminkan mekanisme bagaimana sumber daya dialokasikan dan bagaimana hasilnya didistribusikan kepada masyarakat.

Sementara itu, Dumairy (2016) menekankan bahwa sistem ekonomi tidak berdiri di ruang hampa. Ia berkaitan erat dengan falsafah hidup, pandangan dunia, serta struktur sosial suatu masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi dalam suatu negara akan selalu unik, mencerminkan nilai-nilai, norma, dan tujuan kolektif masyarakatnya. Misalnya, sistem ekonomi Pancasila di Indonesia lahir sebagai hasil sintesis antara semangat kolektivisme dan nilai-nilai keadilan sosial yang berakar pada ideologi negara.

2. Fungsi Teori Sistem Ekonomi

Teori sistem ekonomi memiliki beberapa fungsi mendasar, antara lain:

- a. Fungsi Deskriptif: Teori ini menjelaskan bagaimana mekanisme ekonomi berjalan dalam berbagai sistem yang berbeda, seperti kapitalisme, sosialisme, dan campuran. Ia menyoroti peran pasar, negara, dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya.
- b. Fungsi Normatif: Ia menawarkan visi ideal tentang bagaimana seharusnya sistem ekonomi bekerja untuk mencapai tujuan tertentu, seperti keadilan sosial, efisiensi, dan kesejahteraan kolektif.
- c. Fungsi Prediktif: Teori sistem ekonomi juga memberikan kerangka analisis untuk memprediksi dampak kebijakan tertentu terhadap perilaku ekonomi masyarakat.
- d. Fungsi Evaluatif: Dengan teori ini, kita dapat mengevaluasi apakah sistem ekonomi yang sedang

berjalan telah berhasil mencapai tujuan-tujuannya atau justru memunculkan persoalan baru seperti ketimpangan dan kemiskinan struktural.

3. Klasifikasi Sistem Ekonomi

Secara umum, teori sistem ekonomi mengklasifikasikan sistem ekonomi menjadi beberapa bentuk utama:

- a. Kapitalisme (Liberal): Sistem ini menekankan kebebasan individu dan mekanisme pasar dalam menentukan alokasi sumber daya. Negara hanya berperan minimal. Namun, kapitalisme kerap menghadapi kritik karena memunculkan ketimpangan sosial yang tinggi.
- b. Sosialisme: Sistem ini didasarkan pada prinsip pemerataan dan kepemilikan kolektif atas alat-alat produksi. Negara memegang kendali penuh terhadap kegiatan ekonomi demi mencapai keadilan sosial. Namun, kelemahan sistem ini adalah rendahnya insentif individual dalam berinovasi dan berkembang.
- c. Sistem Ekonomi Campuran: Sistem ini menggabungkan elemen-elemen kapitalisme dan sosialisme. Negara dan pasar bekerja berdampingan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Indonesia menganut sistem ekonomi campuran yang disebut “sistem ekonomi Pancasila”, yang menempatkan negara sebagai pengatur, bukan sebagai pelaku utama, serta menekankan prinsip kekeluargaan, keadilan, dan gotong royong (Sukirno, 2016).

4. Tantangan Implementasi Sistem Ekonomi

Meskipun teori sistem ekonomi telah memberikan landasan filosofis dan teknis yang kuat, penerapannya di lapangan tidak selalu mudah. Salah satu tantangan utamanya

adalah perbedaan kepentingan antarpelaku ekonomi—antara negara, swasta, dan masyarakat. Dalam praktiknya, pelaksanaan sistem ekonomi seringkali dipengaruhi oleh kekuatan politik, tekanan internasional, serta dinamika sosial-budaya yang kompleks.

Sebagaimana dikatakan Dumairy (2016), sistem ekonomi akan berjalan efektif hanya jika lingkungan kelembagaan dan struktur sosialnya mendukung. Jika tidak, maka sistem ekonomi akan menghadapi hambatan berupa konflik kepentingan, korupsi, dan resistensi dari kelompok tertentu.

5. Relevansi Teori Sistem Ekonomi di Era Modern

Di era globalisasi dan revolusi digital, teori sistem ekonomi harus terus diperbarui agar tetap relevan. Tantangan seperti ketimpangan digital, ekonomi hijau, dan transformasi teknologi memerlukan pembaruan dalam pendekatan ekonomi. Sistem ekonomi masa depan dituntut untuk lebih inklusif, berkelanjutan, dan tangguh terhadap krisis.

Teori sistem ekonomi yang adaptif terhadap perubahan zaman akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan manusiawi. Dalam konteks Indonesia, penguatan sistem ekonomi berbasis nilai Pancasila tetap relevan untuk menyeimbangkan efisiensi pasar dan keadilan sosial.

Teori sistem ekonomi bukan hanya sekadar kerangka akademik, tetapi juga cermin dari nilai dan cita-cita sebuah bangsa. Ia membantu menjawab persoalan-persoalan dasar ekonomi serta mengarahkan kebijakan pembangunan ke arah yang selaras dengan tujuan sosial dan kultural suatu negara. Di Indonesia, teori sistem ekonomi menjadi landasan dalam

membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yaitu sistem ekonomi Pancasila.

B. Pengertian dan Ciri-Ciri Sistem Ekonomi

Sistem Ekonomi adalah sarana di mana negara mendistribusikan sumber daya dan memperdagangkan barang dan jasa. Sistem ini digunakan untuk mengendalikan lima faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, pengusaha, sumber daya fisik dan sumber daya informasi.

Pengertian Sistem Ekonomi (Assar Linbeck, 1994) adalah serangkaian mekanisme dan institusi untuk mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan mengenai produksi, pendapatan, konsumsi pada suatu wilayah. Sedangkan dikutip dari buku *Masalah Ekonomi dalam Sistem Ekonomi (2021)* bahwa Sistem Ekonomi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan guna untuk mengolah kegiatan perekonomian baik dalam lingkup pemerintah, masyarakat, atau pun kegiatan swasta agar lebih tertata. berikut adalah ciri-ciri system ekonomi sebagai berikut:

1. Metode kontrol atas faktor atau alat produksi.

Metode-metode kontrol atas faktor-faktor dan alat-alat produksi ini termasuk kepemilikan dan hak-hak properti atas alat-alat produksi yang menimbulkan klaim terhadap hasil produksi.

2. Sistem pengambilan keputusan.

Sistem pengambilan keputusan ini menentukan siapa yang berhak membuat keputusan atas kegiatan ekonomi. Agen ekonomi dengan kekuatan pengambilan keputusan dapat menandatangani kontrak yang mengikat satu sama lain.

3. Mekanisme koordinasi.

Mekanisme koordinasi ini menentukan bagaimana informasi diperoleh dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Dua bentuk koordinasi yang dominan adalah perencanaan dan pasar. Perencanaan dapat berupa desentralisasi atau tersentralisasi. Dan dua mekanisme koordinasi tersebut tidak saling eksklusif dan sering berdampingan.

4. Sistem insentif.

Sistem insentif ini mendorong dan memotivasi agen ekonomi untuk terlibat dalam kegiatan produktif. Sistem insentif didasarkan pada imbalan materi (kompensasi atau kepentingan pribadi) atau bujukan moral. Bujukan moral misalnya gengsi sosial atau melalui pengambilan keputusan demokratis yang mengikat mereka yang terlibat.

5. Bentuk organisasi.

Ada dua bentuk dasar organisasi dalam sistem ekonomi yaitu pelaku (aktor) dan pembuat aturan (regulator) pelaku ekonomi meliputi rumah tangga, kelompok kerja dan tim produksi, perusahaan, usaha patungan dan kartel.

6. Sistem Distribusi.

Sistem distribusi mengalokasikan hasil dari kegiatan produksi yang didistribusikan sebagai pendapatan di antara organisasi ekonomi, individu, dan kelompok dalam masyarakat.